

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Perubahan iklim telah menjadi isu global yang semakin mengkhawatirkan. Hal ini tentunya menjadi ancaman dalam lingkup internasional, termasuk Indonesia. Proses pembuatan energi listrik dan panas menghasilkan gas rumah kaca berbahaya yang menahan panas matahari di Bumi. Selain itu, industri manufaktur, penebangan hutan, dan penggunaan transportasi juga menjadi kontributor utama dalam emisi gas rumah kaca (United Nations, nd). Akibatnya, panas yang dihasilkan dari emisi tersebut membuat suhu bumi meningkat. 90% dari panas ini diserap oleh laut yang menyebabkan air laut mengalami kenaikan suhu sehingga permukaan air laut pun ikut naik (Global Sea Level Change, nd). Naiknya permukaan laut dapat menyebabkan masalah baru, salah satunya adalah banjir.

Banjir merupakan salah satu jenis bencana alam klimatologis berupa luapan air yang besar dan menggenangi daerah sekitarnya (Akbar, et al., 2022). Bencana alam ini disebabkan oleh interaksi kompleks antara dua faktor, yaitu faktor alam dan aktivitas yang dilakukan manusia. Secara alami, tingginya intensitas curah hujan menjadi penyebab utama, didukung oleh geografis daerah. Namun, dampak dari faktor alam diperparah oleh intervensi manusia. Pembangunan yang masif mengubah permukaan tanah menjadi lapisan yang sulit menyerap air hujan. Berkurangnya daerah resapan air secara drastis membuat volume air di permukaan meningkat dan mengakibatkan banjir (Arvi, et al., 2025). Dengan kata lain, interaksi antara faktor alam dengan intervensi dari faktor manusia menjadi faktor yang krusial dalam meningkatkan risiko dan skala bencana banjir.

Jakarta sebagai salah satu kota besar di Indonesia termasuk ke dalam wilayah yang rentan banjir. Data menunjukkan bahwa 40% lahan Jakarta, yang setara dengan 24.000 hektar, berada di bawah permukaan laut (Putro, et al., 2022). Beberapa daerah di Jakarta terletak di bagian pesisir laut dengan risiko tergenang lebih dulu oleh air laut. Ancaman dipercepat oleh penurunan muka tanah (*land subsidence*), dan diperkuat oleh Direktur Pusat Penelitian Perubahan Iklim Tyndall Inggris, Robert Nicholls, yang mengatakan bahwa Jakarta merupakan wilayah yang

paling terancam. Dengan kenaikan permukaan air laut yang mencapai 10 sentimeter per tahun (Setyowibowo, 2021), tercipta situasi krisis pada pertahanan di daerah pesisir yang juga berimbas terhadap kehidupan seluruh masyarakat Jakarta. Hal ini tentu akan merugikan, karena Jakarta menjadi harapan hidup bagi banyak orang.

Jakarta menjadi salah satu kota besar di Indonesia dan memiliki luas wilayah seluruhnya adalah 662,33 km<sup>2</sup> (Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemprov Jakarta, 2024). Luasnya Jakarta menjadikan kota ini sebagai pusat segala aktivitas, seperti pemerintahan, ekonomi, pariwisata, dan lainnya. Pembangunan infrastruktur juga meningkatkan aksesibilitas kota Jakarta. Tentunya, hal ini mendatangkan banyak keuntungan. Selain adanya perpindahan penduduk, pelaksanaan pembangunan infrastruktur juga memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi regional. Daya saing meningkat karena kemudahan akses untuk investasi sekaligus menciptakan lapangan kerja baru (Rohim, 2024). Bahkan, pertumbuhan ekonomi Jakarta mencapai angka 4,95 persen pada tahun 2025 (BPS, 2025). Dengan segala keunggulan yang dimiliki, tidak heran jika Jakarta ditempati oleh lebih dari 11 juta jiwa dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi (SCIP, 2025).

Tingginya kepadatan penduduk di Jakarta membuat warganya rentan menghadapi berbagai bencana. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang berada pada kategori sedang (59,29), menandakan indikasi adanya potensi ancaman bencana yang signifikan (Bagaskoro, et al. 2024). Dari berbagai jenis bencana yang mungkin terjadi, banjir menjadi bencana dengan angka frekuensi tertinggi. Pada awal tahun 2025, Jakarta kembali mengalami hujan dengan intensitas yang tinggi. Pemicu hujan tersebut terdiri atas serangkaian fenomena cuaca dengan skala yang besar. Misalnya, angin Monsun Asia sampai angin La Nina, yang secara bersama-sama meningkatkan intensitas hujan di wilayah ini (Jakarta Smart City, 2025). Dengan demikian, bagi warga Jakarta, musim hujan tidak hanya sekadar fenomena alam, tetapi juga sebagai periode meningkatnya risiko bencana, yang berimbas pada menurunnya rasa aman.

Jakarta memiliki riwayat banjir selama beberapa tahun. Pada tahun 2007, banjir menggenangi sekitar 45% wilayah Jakarta. Kemudian, pada tahun 2013, banjir kembali menggenangi sebanyak 124 kelurahan dan 538 rukun warga (RW).

Begitupun seterusnya, setidaknya-tidaknya banjir merendam paling sedikit 57 kelurahan dan 201 RW pada tahun 2016 (Imaduddin, et al., 2019). Tidak hanya itu, riwayat banjir Jakarta juga pernah mengalami kenaikan yang tinggi, yaitu dari 90 kejadian pada tahun 2019, menjadi 223 kasus pada tahun 2020 (Nurjayati & Mbarep, 2023). Fenomena banjir dengan skala yang besar dan terus berulang ini memberikan pertanda adanya faktor pemicu yang tidak hanya berasal dari alam, tetapi juga dari faktor manusia.

Selain karena faktor alam, banjir juga disebabkan oleh manusia. Penelitian Mas'at (2009) menyatakan pembangunan gedung-gedung tinggi turut berperan dalam peningkatan suhu karena gerakan angin vertikal ke atmosfer. Peningkatan suhu ini dapat meningkatkan intensitas hujan karena udara yang lebih hangat dapat menahan banyak uap air. Meskipun durasi hujan lebih pendek, namun tingkat ekstremitasnya meningkat, ditandai dengan frekuensi dan intensitas hujan pada musim hujan (BRIN, 2024). Maka dari itu, banjir tetap menjadi risiko dari adanya peningkatan suhu di Jakarta ini.

Kerentanan Jakarta terhadap banjir diperparah oleh kritisnya kondisi geologis. Sebanyak 40% lahan Jakarta, atau setara dengan 24.000 hektar sudah berada di bawah permukaan laut (Putro, et al., 2022). Kondisi tersebut terjadi karena dua fenomena yang sekaligus terjadi, kenaikan permukaan air laut dan penurunan muka tanah. Di satu sisi, kenaikan air laut yang mencapai 10 sentimeter per tahunnya mengancam kota Jakarta (Setyowibowo, 2021). Di sisi lain, penurunan muka tanah juga terjadi yang disebabkan oleh masifnya ekstraksi air tanah karena 60% warga masih beraktivitas menggunakan air tanah. Kombinasi dengan beban akibat pembangunan infrastruktur seperti gedung pencakar langit, menyebabkan daratan Jakarta mengalami penurunan hingga 39 sentimeter per tahunnya (Syahidan, et al., 2021; Putro, et al., 2022; Pristiandaru, 2024). Akibat naiknya permukaan air laut dan penurunan muka tanah, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisal Nurofiq memprediksi bahwa Jakarta akan tenggelam pada tahun 2050 (Bempah & Pratama, 2025).

Apabila Jakarta benar-benar tenggelam, Direktur Utama Perumda PAM Jaya, Arief Nasrudin menyatakan diprediksikan 90% wilayah Jakarta akan tenggelam, terutama di bagian utara (Huda, 2022). Tentunya ancaman ini akan

berdampak sangat luas, baik itu dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. 1,8 juta orang akan kehilangan rumahnya, kehilangan kegiatan ekonomi, dan kerusakan materi hingga 103 miliar dolar atau setara 1.000 triliun rupiah (Sari, 2021; Afriyadi, 2021). Tidak hanya itu, banjir yang melanda wilayah Jabodetabek pada bulan Maret 2025 juga menimbulkan kerugian yang besar. Secara spesifik, BNPB mencatat kerugian yang dialami daerah Jakarta mencapai 1,92 miliar (Putra, 2025).

Kerugian yang dialami tidak lantas membuat warga Jakarta merasa terancam akan bencana banjir. Berdasarkan temuan Hendrawati & Sulandari (2023), masyarakat yang tinggal di titik banjir terparah Jakarta (seperti Penjaringan, Cakung, Rawa Buaya, dan Sawah Besar) cenderung tidak menganggap banjir sebagai sebuah ancaman yang ditandai dengan perilaku pasif saat bencana terjadi, seperti hanya memantau keadaan dan mengungsi tanpa persiapan. Perilaku yang pasif tersebut juga diperparah oleh kebiasaan membuang sampah di aliran sungai, yang membuat sampah menumpuk hingga 2.000 ton ketika diangkat dari saringan di TB Simatupang pada Maret 2025 meskipun telah beroperasi sejak November (Azzahra, 2023; Prihatini & Utomo, 2025).

Ketidaksiapan masyarakat Jakarta akan bencana banjir terlihat dari perilaku masyarakat itu sendiri. Hendrawati & Sulandari (2023) menemukan bahwa masyarakat yang tinggal di titik banjir terparah seperti di Penjaringan dan Cakung cenderung tidak menganggap banjir sebagai ancaman yang serius, yang terlihat dari sikap mereka yang hanya memantau saat bencana terjadi dan mengungsi tanpa persiapan. Sikap ini makin diperparah karena masyarakat Jakarta masih membuang sampah ke aliran sungai dan membuatnya semakin menumpuk, meskipun pemerintah telah mengoperasikan saringan sampah di TB Simatupang pada November 2023 (Azzahra, 2023). Sebanyak 2.000 ton sampah diangkut dari saringan sampah TB Simatupang Sungai Ciliwung pada 4 Maret 2025. Lonjakan ini kemudian membuat puluhan petugas ditugaskan untuk membersihkan sampah yang terbawa arus banjir (Prihatini & Utomo, 2025). Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa terdapat masyarakat Jakarta yang masih membuang sampah ke aliran sungai yang akhirnya menumpuk dan membuat air naik, sehingga berisiko banjir saat musim hujan. Selain itu, pakar teknik sipil, Faqih Ma'arif menyoroti adanya pengabaian terhadap informasi peringatan dini dari Badan Meteorologi,

Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), padahal informasi tersebut telah tersedia jauh hari sebelum bencana terjadi (Antara, 2020). Fenomena ini kontradiktif dengan penelitian yang dilakukan oleh Harahap (2024) yang menyatakan bahwa media sosial efektif dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi banjir. Runtunan perilaku tersebut, mulai dari tidak adanya sikap waspada, membuang sampah sembarangan, sampai pengabaian informasi menunjukkan rendahnya kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat Jakarta. Hal ini menandakan perlunya penelitian lebih lanjut dengan menyertai faktor-faktor lain yang dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesiapsiagaan bencana masyarakat Jakarta.

Menurut *United Nations Office for Disaster Risk Reduction* (2017), kesiapsiagaan adalah pengetahuan dan kapasitas yang dikembangkan oleh pemerintah, organisasi tanggap darurat dan pemulihan, masyarakat, dan individu untuk mengantisipasi, menanggapi, dan memulihkan keadaan diri dari dampak bencana yang mungkin terjadi, akan terjadi, atau sedang terjadi. Sementara itu, dalam penelitian Widiasih, et al. (2022), kesiapsiagaan didefinisikan sebagai rangkaian tindakan yang memungkinkan dilakukan secara simultan oleh pemerintahan, organisasi, masyarakat, komunitas, dan individu untuk mengantisipasi bencana. Tindakan yang dilakukan tentu melalui pengaturan dengan langkah yang tepat guna agar bencana dapat ditanggapi dengan cepat dan tepat. Sedangkan, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 7, kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Dari berbagai definisi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kesiapsiagaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh berbagai pihak untuk mengantisipasi segala risiko yang akan, mungkin, atau sedang terjadi secara cepat dan tepat.

Kesiapsiagaan bencana dilakukan dari sebelum bencana terjadi. Berdasarkan buku Panduan Kesiapsiagaan Menghadapi Banjir bagi Masyarakat (BPBD Jakarta, 2020), beberapa tindakan yang dapat dilakukan saat tidak terjadi banjir yaitu tidak membuang sampah ke aliran sungai atau saluran air, tidak mendirikan bangunan di bantaran sungai, dan tidak mengabaikan informasi peringatan dini. Masyarakat juga dapat melakukan persiapan lain seperti

mengetahui zona rawan banjir, mengetahui jalur evakuasi darurat dan lokasi pengungsian, mencatat nomor darurat, serta menyiapkan tas siaga bencana yang berisi kebutuhan pokok dan dokumen penting. Oleh karena itu, kesiapsiagaan bencana sangat penting untuk diketahui untuk dapat mengurangi kerugian yang mungkin terjadi melalui tindakan yang cepat dan efisien. Dengan kesiapsiagaan, masyarakat dapat berkoordinasi dan merencanakan tindak mitigasi saat banjir akan melanda (Taryana, et al., 2022)

Salah satu faktor sosial yang dapat memengaruhi upaya kesiapsiagaan bencana adalah fenomena keterikatan yang kuat dengan tempat tinggal, yang dapat tercermin pada warga di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung. Pada awalnya, pemukiman ini terbentuk karena keterbatasan lahan di Jakarta yang pada akhirnya menyebabkan adanya pemukiman kumuh. Untuk mengatasinya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta berencana untuk merelokasi warga setempat. Namun, warga menolak pindah dan memilih tetap tinggal di tempat tersebut (Ananta, et al., 2023). Peristiwa serupa terjadi pada warga Kebon Pala, Jakarta Timur. Wilayah tersebut terdampak banjir pada awal tahun 2025. Namun, warga tidak mau menerima tawaran pemerintah provinsi untuk pemindahan ke rumah susun (rusun). Rasa nyaman tinggal di daerah tersebut bersama warga lainnya menjadi alasan warga untuk menolak dipindahkan. Selain itu, warga juga menolak karena akses untuk mencari pendapatan yang lebih sulit jika mereka berpindah ke rusun (Movanita, 2025). Penolakan warga atas usulan relokasi oleh pemerintah memberikan pertanda bahwa keterikatan terbangun atas faktor afeksi yaitu rasa nyaman, dan faktor ekonomi yang berkaitan dengan akses dan cara mereka mendapatkan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan. Ikatan kuat yang didorong faktor afeksi dan ekonomi ini membentuk sebuah fenomena yang disebut dengan *place attachment*.

Istilah *place* menekankan pada lingkungan atau ruang yang memiliki makna khusus secara emosional dan kultural bagi individu atau sekelompok orang tertentu. Sedangkan *attachment* lebih membahas dari sisi emosi atau afeksi (Depari, 2023). Oleh karena itu, keterikatan pada *place attachment* bersifat afektif dan jangka panjang terhadap suatu wilayah tertentu yang kemudian membuat suatu tempat menjadi 'identitas' (Reyes, 2020). Penelitian Mishra, et al. (2010) yang menemukan

bahwa *place attachment* berkorelasi secara signifikan dengan kesiapsiagaan banjir, Han (2025) juga menyatakan bahwa *place attachment* dapat menjadi motivasi bagi perilaku adaptif. Contohnya seperti mendorong individu untuk menjaga tempat tinggal mereka dari risiko banjir dan peduli terhadap sesama. Individu yang memiliki keterikatan tinggi dengan tempat tinggalnya juga akan lebih memilih untuk menghadapi ‘ancaman’ atau bencana karena menyadari bahaya yang mengintai (Stancu, et al., 2020). *Place attachment* sebagai salah satu faktor diduga dapat berperan dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat atas rasa terikat untuk melindungi lingkungan dan dirinya sendiri. Dalam konteks dorongan yang bersifat emosional, dapat dikaji pula peran persepsi terhadap risiko bencana yang kemungkinan memengaruhi faktor keterikatan tersebut.

Persepsi terhadap risiko bencana menjadi salah satu fondasi manajemen risiko. Namun, dalam kenyataannya, seringkali program manajemen risiko, seperti peringatan dini, tidak direspon dengan baik oleh masyarakat. Ini merupakan dampak dari perbedaan pandangan risiko antara otoritas dengan masyarakat yang memandang risiko secara subjektif. Dalam usaha psikososial *disaster risk reduction* (DRR), ditemukan bahwa masyarakat memberikan kesan tenang dan aman sekalipun tinggal di daerah dengan risiko dampak bencana yang tinggi (Arini, 2012). Hal ini sejalan dengan temuan pada masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran Sungai Ciliwung. Meski sudah dilanda banjir setidaknya 10 kali, mereka tetap tidak ingin pindah, karena banjir sudah dianggap seperti hal yang biasa terjadi (Jati, et al., 2023). Akibatnya, mereka hanya melakukan apa yang biasanya dilakukan terus menerus, walaupun dampaknya tidak berubah secara signifikan. Padahal, kemampuan melakukan tindakan kesiapsiagaan juga dipengaruhi oleh faktor pandangan terhadap risiko bencana yang mungkin terjadi, atau biasa disebut sebagai persepsi risiko.

Kemampuan seseorang dalam melakukan tindakan kesiapsiagaan juga dipengaruhi oleh pandangannya terhadap risiko bencana yang akan terjadi, yang juga disebut sebagai persepsi risiko. Menurut Ng (2022), persepsi risiko dapat didefinisikan sebagai penilaian subjektif terhadap risiko bencana. Persepsi yang bersifat subjektif ini seringkali menjadi dasar pengambilan keputusan, terutama dalam keadaan bencana (Aristyavani, 2022). Hal ini dikarenakan risiko bencana

merupakan kerugian yang bisa saja muncul sebagai akibat terjadinya bencana pada suatu wilayah atau kurun waktu tertentu. Namun, tidak ada yang tahu pasti kapan bencana akan terjadi. Ketidakpastian ini membuat perbedaan pandangan dalam memandang sebuah risiko, yang dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, dampak yang dirasakan, tingkat keparahan, waktu bencana terjadi, sampai dengan faktor demografis (Ruddin, et al., 2022).

Sejalan dengan hasil penelitian Nugrahani dan Imamah (2024) yang menemukan bahwa persepsi risiko memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kesiapsiagaan dengan hubungan yang positif. Ran, et al. (2021) juga menemukan adanya korelasi positif yang signifikan antara persepsi risiko dengan kesiapsiagaan bencana. Perilaku tersebut berkaitan dengan faktor-faktor lain seperti kemungkinan terdampak bencana, ancaman pada nyawa individu, rasa khawatir, dan persepsi risiko yang berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan kerangka *Protective Action Decision Model* (PADM). PADM dikembangkan untuk melihat alur pengambilan keputusan berdasarkan respon individu terhadap tanda bahaya dari lingkungan dan bencana. Keputusan individu berdasarkan pada kondisi lingkungan, petunjuk sosial, dan peringatan. Proses-proses ini memicu persepsi atas penyesuaian terhadap bahaya, yang kemudian menjadi dasar tindakan perlindungan (Khawaja, et al., 2024). Dalam konteks bencana banjir, berarti seseorang dapat melihat potensi bencana banjir dari berbagai sumber seperti keadaan alam atau berita. Kemudian, individu dapat melakukan evaluasi risiko berdasarkan keadaan tempat tinggal dan pengalaman banjir, dilanjutkan dengan mencari opsi tindakan perlindungan dan melaksanakannya.

Pada penelitian sebelumnya menunjukkan secara konsisten adanya korelasi positif antara *place attachment* dengan kesiapsiagaan bencana (Wang et al., 2021; Mishra, 2010; Indayani et al., 2021). Artinya, semakin seseorang merasa terikat dengan tempat tinggalnya, maka semakin tinggi pula kemungkinannya untuk melakukan tindakan kesiapsiagaan. Oleh karena itu, *place attachment* menjadi faktor yang penting untuk diteliti dalam konteks bencana, karena faktor ini berperan berpengaruh terhadap kesejahteraan warga. Dengan adanya *place attachment*, perilaku pro-lingkungan akan dapat terbentuk sebagai bentuk kepedulian terhadap ruang publik milik sesama (Sultoni, 2025). Terlepas dari pentingnya *place*

*attachment*, penelitian terkait kontribusi *place attachment* terhadap kesiapsiagaan bencana dapat dikatakan masih cukup terbatas. Kondisi ini diperkuat dengan fenomena yang menunjukkan inkonsistensi bahwa orang yang terikat dengan tempat tinggalnya, justru tidak melakukan tindakan kesiapsiagaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih lanjut dan mengisi *gap* tersebut.

Fenomena inkonsistensi *place attachment* tersebut menunjukkan adanya rasa aman yang keliru (*false sense of security*). Individu dengan keterikatan yang tinggi dengan tempat tinggalnya justru memandang banjir bukan sebagai bahaya. Adanya fenomena tersebut memberikan indikasi adanya faktor lain yang dapat mengubah pandangan risiko individu terhadap banjir. Oleh karena itu, persepsi risiko bencana dapat dipertimbangkan untuk memodifikasi keterikatan tempat tinggal menjadi pendorong untuk melakukan tindakan kesiapsiagaan bencana. Pemilihan persepsi risiko sebagai variabel moderator didasarkan pada hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa individu dengan persepsi risiko yang baik akan memiliki tingkat kesiapsiagaan bencana yang baik pula (Nastiti, et al., 2021; Susila, et al., 2020). Dalam kerangka *Protective Action Decision Model* (PADM), persepsi terhadap ancaman atau risiko mengarah pada tindakan identifikasi risiko yang penting dalam tindakan protektif kesiapsiagaan (Lindell & Perry, 2011). Meskipun hasil penelitian menemukan adanya hubungan, temuan yang konsisten menunjukkan persepsi risiko merupakan faktor yang mempengaruhi keputusan individu untuk bersiap siaga.

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diketahui bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh *place attachment* terhadap kesiapsiagaan bencana dengan peran moderator oleh persepsi risiko dalam menghadapi banjir. Selain itu, penelitian ini juga mengikutsertakan variabel *covariates* yaitu jenis kelamin dan pengalaman banjir sebagai variabel yang dikontrol.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang terjadi, maka masalah-masalah yang dapat teridentifikasi yaitu:

1. Jakarta adalah wilayah yang rentan mengalami bencana banjir. Risiko yang ditimbulkan berpotensi semakin parah karena adanya riwayat banjir dalam beberapa tahun.
2. Rendahnya kesiapsiagaan masyarakat Jakarta yang ditandai dengan pembuangan sampah di sungai dan penolakan relokasi.
3. Banjir dianggap sebagai suatu hal yang biasa terjadi, bukan sebagai suatu bencana.

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Penelitian ini akan berfokus pada analisis pengaruh dari *place attachment* terhadap kesiapsiagaan bencana masyarakat Jakarta dalam menghadapi banjir. Ruang lingkup penelitian ini juga akan lebih dibatasi pada kajian peran persepsi risiko yang diduga dapat berperan dalam memodifikasi pengaruh kedua variabel tersebut. Pembatasan ini dilakukan untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, serta memastikan kedalaman penelitian.

### **1.4. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, “Apakah terdapat pengaruh *place attachment* terhadap kesiapsiagaan masyarakat di Jakarta yang dimoderasi oleh persepsi risiko dalam menghadapi bencana banjir?”

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *place attachment* terhadap kesiapsiagaan masyarakat di Jakarta dan peran serta persepsi risiko sebagai moderasi dalam menghadapi bencana banjir.

### **1.6. Manfaat Penelitian**

#### **1.6.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang psikologi sosial dan psikologi bencana. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur bagi mahasiswa, dosen/pengajar, siswa, maupun masyarakat umum untuk menambah wawasan mengenai kesiapan diri dalam menghadapi bencana. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin meneliti dengan faktor-faktor psikologis

lain yang berkontribusi terhadap kesiapsiagaan. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memperkuat atau mengembangkan teori yang berkaitan dengan psikologi dan kebencanaan.

#### **1.6.2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah Jakarta untuk merancang kebijakan dan program edukasi kebencanaan yang lebih tepat sasaran. Dengan memahami keterikatan dengan tempat tinggal, persepsi risiko, dan kesiapsiagaan bencana masyarakat, program dapat lebih terarah dan pelaksanaannya dapat lebih efektif. Selain dari pemerintah, intervensi mengenai kesiapsiagaan bencana dapat dilakukan oleh lembaga kebencanaan (contoh: Badan Penanggulangan Bencana) dan lembaga non-pemerintah (*Non - Governmental Organization/NGO*). Dengan menggunakan penelitian ini sebagai landasan, lembaga dapat menyusun program pelatihan kesiapsiagaan bencana yang praktis dan mudah untuk dipahami sehingga nantinya dapat langsung diterapkan.